

**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIONS  
POST-GRADUATE PROGRAM  
STUDY PROGRAM OF ADMINISTRATIONS  
CONCENTRATION OF ADMINISTRATIONS AND TAX POLICIES**

**ABSTRACT**

**DEVY SISWANDAYANI  
6905030774**

**THE ASPECTS OF TAX IN ONLINE AUCTION SERVICE  
TRANSACTION BY PRIVATE AUCTION HOUSES IN INDONESIA**

xvi + 100 Pages + 2 Tables + 1 Figure

References: 45 literatures, 11 articles, 22 other sources (1898-2008)

The greatest resource of national income is tax and it is ever increasing over years. The national government, in making tax policies, should be able to adapt its position to and anticipate new changes by always cultivating any potential tax that remains hidden and not taxable so far. A potential one may cultivate to help increase the national income is those who earn revenues from the auction transaction.

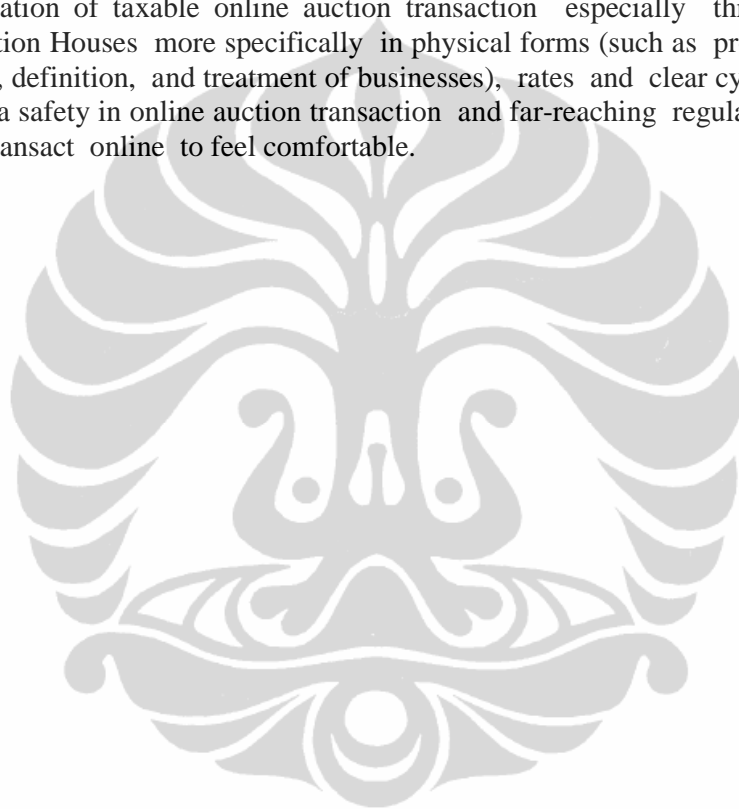
The national government has observed some broad markets for transaction of privately-owned goods and that existence of the Private Auction Houses will realize ideal, efficient, transparent and competitive concepts. These concepts are adjustable to free-trade which requires transparency and professionalism. Moreover, services that the Private Auction Houses provide include sales of goods that belong to other people on auction base such as repairs, appraisal, marketing and many others. For any service they provide, the Private Auction Houses receive fee in return from the owner of goods.

Problem of this thesis is identifying determinants of Income Tax and Value Added Tax that the Private Auction Houses apply to the transaction of online auction services.

Research method used in this thesis is descriptive analysis, with qualitative approach. The collecting data through library research and field study by interviewing key informans and depth observations.

In conclusion, research findings indicate that the Private Auction Houses play parts in increasing loyalty of Tax Payers to meet their tax liabilities and reduce risks of tax evasion and thus improve national income in more optimum manner.

It is suggested that the Private Auction Houses should recognize promotion-based auction concept in order to prevent them from worrying to manage transactions and otherwise, the national government should make, as well, regulation of taxable online auction transaction especially throughout Private Auction Houses more specifically in physical forms (such as procedures of taxation, definition, and treatment of businesses), rates and clear cyberlaws; a rule of data safety in online auction transaction and far-reaching regulation for those who transact online to feel comfortable.



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINITRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

## ABSTRAK

DEVY SISWANDAYANI  
6905030774

ASPEK PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI JASA LELANG *ONLINE*  
OLEH BALAI LELANG SWASTA DI INDONESIA

xvi + 100 Halaman + 2 Tabel + 1 Gambar  
Daftar Pustaka : 45 buku literatur, 11 artikel, 22 literatur lainnya (1898-2008)

Sumber penerimaan negara terbesar adalah berasal dari sektor perpajakan dan besarnya penerimaan pajak ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan dituntut untuk mampu menyelaraskan diri dan harus mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru dengan terus berupaya menggali potensi-potensi perpajakan yang selama ini masih tersembunyi atau luput dari pengenaan pajak. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan penerimaan negara adalah adanya pihak yang memperoleh penghasilan pada peristiwa pelelangan.

Pemerintah melihat pasar yang luas bagi transaksi barang-barang milik swasta dan dengan adanya Balai Lelang Swasta (BLS) konsep lelang yang ideal seperti efisien (cepat), terbuka (transparan), dan kompetitif (harga bersaing) bisa diwujudkan. Konsep ini sesuai dengan konsep pasar bebas yang menuntut transparansi dan profesionalisme. Sedangkan jasa yang diberikan oleh balai lelang swasta adalah jasa menjualkan barang milik orang lain secara lelang, jasa tersebut meliputi jasa perbaikan, jasa nilai, jasa pemasaran dan lain sebagainya. Atas jasa yang diserahkan tersebut, Balai Lelang mendapat penggantian (*fee*) dari pemilik barang.

Masalah pokok tesis ini adalah untuk mengetahui ketentuan Pajak

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini mengenai transaksi jasa lelang online oleh Balai Lelang Swasta di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan melalui wawancara dengan dengan key informan dan pengamatan mendalam.

Sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan peranan Balai Lelang Swasta dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak serta mengurangi resiko terjadinya *tax evasion* sehingga akan menambah pendapatan negara secara lebih optimal.

Disarankan agar Balai Lelang Swasta harus memperkenalkan konsep lelang dengan melakukan promosi agar orang tidak merasa ragu dan takut untuk melakukan transaksi melalui Balai Lelang Swasta dan Pemerintah dituntut untuk membuat peraturan pengenaan pajak atas transaksi lelang *online* khususnya yang dilakukan oleh Balai Lelang Swasta lebih spesifik dari segi bentuk fisiknya (antara lain tata cara pelaksanaan maupun prosedur, definisi maupun mengenai perlakuan terhadap pelaku bisnis) maupun tarifnya, serta adanya perangkat hukum yang jelas di bidang *cyberlaw* salah satunya yaitu mengenai peraturan yang menjamin keamanan data dalam setiap pelaksanaan transaksi lelang *online*, serta mengatur tentang peraturan hukum secara menyeluruh sehingga para pihak yang melakukan transaksi merasa nyaman dalam melakukan transaksi melalui bisnis *online*.